

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian atau variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:60). Objek dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah Pendapatan asli Daerah dan Dana Perimbangan dan objek variabel terikatnya adalah Belanja Daerah.

3.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta Di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kunci Putih, Batar Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Bhatari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit

Geger Hanjung, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang SiksKandang Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada jaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan Ibu Kota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam kecamatan salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah sunda untuk megajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk islam.

Periode selanjutnya adalah pemerintah di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi

Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadah I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negri yng awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negar” disebut “Sukapura”.

Pada masa pemerintahan R.T Surilaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menanggapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.

Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupati. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 3 November 2016, Dalam

peraturan Daerah tersebut membentuk sebanyak 25 perangkat Daerah dan terdapat 3 perangkat daerah yang tidak dibentuk melainkan tetap melaksanakan dengan wadah sebelumnya antara lain: RSUD singaparna Medika Citrautama, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berikut ke 25 perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan perda No 7 2016:

1. Sekertariat Daerah
2. Sekertariat DPRD
3. Insfektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Iformatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecvil dan Menengah dan Tenaga Kerja
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan
19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
20. Dinas Lingkungan Hidup
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Kepegawaian Daerah
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menindaklanjuti pembentukan perangkat daerah tersebut diatas, sub bagian kelembagaan bagian organisasi Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun sekurang-kurangnya 26 peraturan Bupati mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, 30 peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya tentang pembentukan, susunan organisasi. Tugas dan fungsi masing-masing UPT dan 4 buah peraturan Bupati mengenai pedoman-pedoman Tata kerja dalam rangka operasional kelembagaan pada tahun Anggaran 2017.

Penyusunan 60 peraturan Bupati harus diselesaikan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu 2 bulan atau sekitar 44 hari kerja, mengingat rencana pengisian jabatan atas struktur yang baru diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir Desember 2016.

Profil Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak diantara 7°02' dan 7°50' Lintang Selatan serta 109°97' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya

2. Sebelah Timur: Kabupaten Ciamis
3. Sebelah Selatan: Samudra Indonesia
4. Sebelah Barat: Kabupaten Garut

Dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 3.1. Luas wilayah menurut Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Cipatujah	246.67
2	Karangnunggal	136.33
3	Cikalong	139.66
4	Pancatengah	201.85
5	Cikatomas	132.68
6	Cibalong	58.58
7	Parungponteng	47.27
8	Bantarkalong	59.83
9	Bojong asih	38.58
10	Culamega	68.32
11	Bojongsambir	169.29
12	Sodonghilir	93.11
13	Taraju	55.85
14	Salawu	50.5
15	Puspahiang	34.9
16	Tanjungjaya	36.69
17	Sukaraja	43.09
18	Salopa	121.76
19	Jatiwaras	73.37
20	Cineam	78.79
21	Karangjaya	47.9
22	Manonjaya	39.41
23	Gunungtanjung	36.31

No	Kecamatan	Luas (km ²)
24	Singaparna	24.82
25	Mangunreja	19.92
26	Sukarame	29.64
27	Cigalontang	119.75
28	Leuwisari	53.26
29	Padakembang	49.66
30	Sariwangi	37.71
31	Sukaratu	57.13
32	Cisayong	59.4
33	Sukahening	28.42
34	Rajapolah	21.45
35	Jamanis	21.28
36	Ciawi	45.32
37	Kadipaten	45.79
38	Pagerageng	66.74
39	Sukaresik	17.8
Tasikmalaya		2 708.82

3.1.1.1 Visi Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah:

1. Religius / Islami
2. Dinamis
3. Berdaya saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan

3.1.1.2 Misi Kabupaten Tasikmalaya

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berahlaqulkarimah dan berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang Agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dimana penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Dan sedangkan metode verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini juga digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis.

Kedua metode penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi factual, mengidentifikasi suatu masalah, melakukan tes hipotesis serta memperoleh jawaban mengenai bagaimana hubungan dari hubungan suatu variabel ke variabel yang lain.

3.2.1. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono,2010:59).

Operasionalisasi variabel yaitu kegiatan menguraikan variabel menjadi sebuah variabel operasional (indikator) yang langsung menunjukkan pada hal-hal yang diamati atau diukur, sesuai dengan judul yang dipilih yaitu: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah” di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2019.

1. Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (X1)
- b. Dana Perimbangan (X2)

2. Variabel Tidak Bebas (Dependent Variabel)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel operasionalisasi Variabel 3.2

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Menurut Baldric Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul <i>Akuntansi Sektor</i>	Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	Rupiah

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Publik</i> , Pendapata Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah.	Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah • Retribusi Daerah • Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Lain-lain Pendaptan Asli Daerah Yang Sah 	
Dana Perimbangan (X2)	Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil (DBH) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Rupiah
Belanja Daerah (Y)	Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam	Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rupiah

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	periode tahun anggaran berkenaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Operasi • Belanja Modal • Belanja tidak terduga • Belanja Transfer 	

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*), yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

3.2.3.2 Prosedur Pengumpulan Data

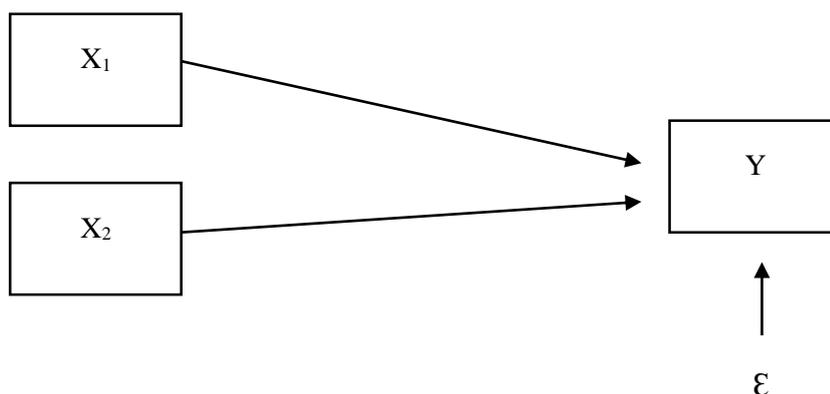
Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur bidang ekonomi dan akuntansi yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir dan teori yang sesuai dengan topik penelitian.
2. Penelitian dokumenter yaitu dengan menelaah dan menganalisa laporan-laporan mengenai Akuntansi Sektor Publik dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.

3.3. Model Penelitian

Model atau paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah” di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009-2019, maka paradigma penelitiannya adalah:



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Dimana:

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Perimbangan

Y = Belanja Daerah

ε = Variabel yang tidak diteliti

3.4 Teknis Analisis Data

3.4.1 Uji Model/Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang baru dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya analisis logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier, misal uji multikolinieritas tidak dapat digunakan pada analisis regresi linier sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cros sectional*. Ada beberapa alat uji yang sering dilakukan dalam uji asumsi klasik diantaranya adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbatas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, baik variabel dependen maupun independennya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji

normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, Skewness dan Kurtois atau uji KolmogorovSmimov. Tidak ada metode yang buruk atau tidak tepat.

Pada pengujian normalitas, untuk mengetahui apakah residunya berdistribusi secara normal sesuai asumsi regresi dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Cara untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio *skewness* dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio *skewness* adalah nilai *skewness* dibagi dengan *standard error kurtosis*. Sebagai pedoman, bila rasio *kurtosis* dan *skewness* berada diantara -2 hingga +2 maka distribusi data adalah normal.

3.4.1.2 Uji Multikolineritas

Multikolineritas adalah terjadinya hubungan linier yang sempurna yang pasti ada perubahan-perubahan bebas. Untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolineritas yaitu dengan cara uji korelasi yaitu dengan melihat keeratan antara hubungan dua variabel penjelas.

3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heterokedastisitas, penaksiran OLS tetap tidak bisa tetapi tidak efisien. Untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heterokedastisitas atau tidak, salah satunya dengan uji *Glesjer*. Uji *Glesjer* secara umum dinotasikan sebagai berikut:

$$|e| = b_1 + b_2X_2 + v$$

Dimana:

$|e|$ = Nilai Absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model

X_2 = Variabel Penjelas

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah heteroskedastitas.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi salah satunya dengan uji *Durbin Waston (DW test)*. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*First Order Autocorelation*) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel *log* diantara variabel penjelas, keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW berada diantara d_u sampai dengan $4-d_u$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih kecil daripada d_1 , koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW terletak diantara d_1 dan d_u maka tidak dapat disimpulkan.
4. Bila nilai DW lebih besar daripada $4-d_1$, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya autokorelasi negative.
5. Bila nilai DW terletak antara $4-d_u$ dan $4-d_1$, maka dapat disimpulkan.

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Perimbangan

α = Konstanta

ε = variabel lain yang tidak diteliti penulis

$\beta_{1,2,3}$ = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata perubahan yang diharapkan dalam respon Y (negative/positif) per unit perubahan dalam masing-masing variabel X disebut dengan slope. Adapun untuk menghitung α dan digunakan program SPSS.

3.4.3 Koefisien Determinasi

Untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel independen (X₁, X₂) terhadap (Y) dapat digunakan koefisien determinasi yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Besarnya koefisien determinasi (r^2) terletak antara 0 dan 1 atau 0% sampai dengan 100%. Sebaliknya jika $r^2 = 0$, model tadi tidak menjelaskan sedikitpun pengaruh variasi variabel X terhadap variasi variabel Y. Kecocokan model dikatakan lebih baik jika r^2 semakin dekat dengan 1. Jadi untuk batas koefisien determinasi adalah $0 \leq r^2 \leq 1$.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian hipotesis penelitian yang akan penulis lakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan adalah:

a. Secara parsial

$H_0: \beta_{YX_1} = 0$: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

$H_a: \beta_{YX_1} > 0$: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

$H_0: \beta_{YX_2} = 0$: Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

$H_a: \beta_{YX_2} > 0$: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

b. Secara Simultan

$H_0: \beta_{YX_1} = \beta_{YX_2} = 0$ Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

$H_a: \beta_{YX_1} > \beta_{YX_2} > 0$ Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2. Penempatan Tingkat Signifikan

Tarif signifikan (α) ditetapkan sebagai 5% ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat kesalahan adalah 5%. Tarif signifikan adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

3. Keputusan

a. Secara parsial

Jika signifikansi $t < (\alpha = 0,05)$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

Jika signifikansi $t \geq (\alpha = 0,05)$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

b. Secara simultan

Jika signifikansi $F < (\alpha = 0,05)$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

Jika signifikansi $F \geq (\alpha = 0,05)$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, penulis akan melakukan menganalisa, hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.